

REVITALISASI RANTAI DISTRIBUSI BERBASIS KELEMBAGAAN SOSIAL: PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI JAGUNG

Agus Setyawanto^{1*}, Dwi Astutiek², Bachtiar Hariyadi³, Ripin Ikhwandi⁴

^{1,2}Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia

^{3,4}STAI An Najah Indonesia Mandiri, Sidoarjo, Indonesia

*Penulis Korespondensi, email: agusdady9@gmail.com

Received: 23/05/2025

Revised: 19/06/2025

Accepted: 21/06/2025

Abstract. The community engagement program aims to strengthen the bargaining position of corn farmers in Turen Subdistrict by revitalising a distribution system based on social institutions, particularly farmer cooperatives. The significance of this initiative lies in addressing the inequality in agricultural product distribution, which has long been dominated by middlemen, weakening farmers' economic power. The approach employed is Participatory Action Research (PAR), which actively involves farmers in all stages, including problem identification, planning, implementation, and evaluation. The results show that establishing a participatory-based cooperative not only improves distribution efficiency and price transparency but also fosters social transformation, characterised by increased collective awareness, solidarity, and farmers' independence in managing the distribution process. These findings reinforce the role of local institutions as a foundation for sustainable economic empowerment and demonstrate that participatory-based interventions are effective in building a fairer and more adaptive distribution system.

Keywords: corn farmers, economic empowerment, revitalisation, social institutions

Abstrak. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memperkuat posisi tawar petani jagung di Kecamatan Turen melalui revitalisasi sistem distribusi berbasis kelembagaan sosial, khususnya koperasi tani. Signifikansi kegiatan ini terletak pada upaya mengatasi ketimpangan distribusi hasil pertanian yang selama ini didominasi tengkulak dan memperlemah ekonomi petani. Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), dengan melibatkan petani secara aktif dalam setiap tahap: identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pembentukan koperasi berbasis partisipasi tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi dan transparansi harga, tetapi juga mendorong perubahan sosial berupa peningkatan kesadaran kolektif, solidaritas, serta kemandirian petani dalam pengelolaan distribusi. Temuan ini memperkuat peran kelembagaan lokal sebagai fondasi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan serta menunjukkan bahwa intervensi berbasis partisipasi efektif dalam membangun sistem distribusi yang lebih adil dan adaptif.

Kata Kunci: petani jagung, pemberdayaan ekonomi, revitalisasi, kelembagaan sosial

How to Cite: Setyawanto, A., Astutiek, D., Hariyadi, B. & Ikhwandi, R. (2025). REVITALISASI RANTAI DISTRIBUSI BERBASIS KELEMBAGAAN SOSIAL: PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI JAGUNG. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2) 168-180. doi: <https://doi.org/10.37478/mahajana.v6i2.5778>

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki peran vital dalam menopang ketahanan pangan nasional dan penguatan ekonomi perdesaan. Komoditas jagung, sebagai salah satu tanaman pangan strategis, memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian masyarakat pedesaan, termasuk di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kecamatan ini memiliki potensi produksi jagung yang tinggi, dengan luasan lahan pertanian yang mendukung serta kultur agraris masyarakatnya yang kuat. Data Kabupaten Malang dalam angka (2024) menjelaskan sektor pertanian menjadi sektor penyumbang terbesar pendapatan daerah, kemudian diikuti sektor perdagangan dan jasa. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar karena keberadaan lahan pertanian masih sangat luas, selain itu masyarakatnya sebagian besar sebagai petani, berdasarkan hal tersebut sektor pertanian di Kabupaten Malang menjadi unggulan. Hasil pertanian di Kabupaten Malang yang didominasi oleh tanaman pangan karena memang keberadaan lahan pertanian yang berupa sawah, tegalan masih sangat luas dan tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Salah satu hasil pertanian tanaman yang menjadi unggulan selain padi adalah jagung. Jagung menjadi tanaman yang diunggulkan karena bisa menjadi pengganti padi atau ditanam

setelah masa tanam padi. Berdasar jenis lahan yang ada di Kabupaten Malang yang terdiri dari lahan teknis, lahan tadah hujan dan lahan hutan tanaman menjadikan jagung bisa tumbuh dengan baik. Lahan teknis dalam 1 tahun memiliki 3 kali masa tanam yaitu jagung 2 kali kemudian baru padi. Lahan tadah hujan yang memiliki masa tanam 3 kali yaitu padi 1 kali jagung 2 kali dan yang terakhir lahan hujan yang sepanjang tahun ditanami jagung. Berdasarkan kelebihan tersebut jagung menjadi tanaman pangan icon di Kabupaten Malang sehingga perlu untuk lebih dikembangkan lagi potensi pertanian jagung.

Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap kesejahteraan petani secara optimal. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh petani jagung di Kecamatan Turen adalah lemahnya sistem distribusi hasil panen. Hasil wawancara awal dan observasi lapangan menunjukkan bahwa setelah panen, petani cenderung menjual hasil jagung kepada tengkulak atau pedagang perantara dengan harga yang relatif rendah. Minimnya akses ke pasar yang lebih luas dan struktur distribusi yang timpang mengakibatkan petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam rantai nilai pertanian. Dalam konteks inilah, distribusi hasil pertanian bukan sekadar persoalan teknis logistik, melainkan isu sosial-ekonomi yang berkaitan dengan struktur kelembagaan, relasi kekuasaan, dan akses terhadap informasi pasar. Selain itu, konteks pandemi COVID-19 dan dampak pasca-pandemi yang masih terasa juga menambah urgensi dari penguatan distribusi lokal. Banyak petani mengalami kesulitan distribusi karena gangguan pada jalur pasok dan akses pasar. Dalam kondisi ini, strategi revitalisasi distribusi berbasis kelembagaan lokal dapat menjadi solusi resilien yang memperkuat daya tahan petani menghadapi krisis. Sebagaimana dikemukakan oleh (Budiman & Suhendi, 2024), sistem distribusi berbasis komunitas terbukti lebih tahan terhadap gangguan eksternal karena memiliki jaringan sosial yang fleksibel dan kuat.

Data pendukung dari Dinas Pertanian Kabupaten Malang tahun 2024 menunjukkan bahwa Kecamatan Turen merupakan salah satu sentra produksi jagung dengan luas lahan sekitar 2.786 hektar dan produksi rata-rata 6,6 ton per hektar. Namun, sebagian besar hasil panen masih dijual dalam bentuk pipilan kering tanpa pengolahan lanjutan atau akses ke pasar luar daerah. Kelompok tani di wilayah ini relatif aktif, namun masih lemah dalam fungsi distribusi dan pemasaran. Mereka cenderung hanya berfungsi sebagai forum pertemuan rutin atau pengakses bantuan sarana produksi, belum berkembang sebagai institusi ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan hasil panen.

Secara historis, petani di Turen memiliki tradisi gotong royong yang kuat dalam hal panen, simpan pinjam, dan kegiatan sosial. Ini menunjukkan bahwa terdapat potensi aset sosial yang dapat diaktivasi kembali sebagai basis kelembagaan ekonomi baru. Dengan pendampingan yang tepat, nilai-nilai kultural ini dapat direvitalisasi untuk memperkuat sistem distribusi hasil panen yang lebih adil dan menguntungkan petani. Pendekatan yang digunakan mengacu pada model Asset-Based Community Development (ABCD), di mana pengembangan komunitas dimulai dari aset yang dimiliki, bukan dari kekurangannya (Green & Haines, 2015; McKnight & Kretzmann, 1993). Berbagai tantangan yang dihadapi menyebabkan petani jagung di Turen belum mampu memperoleh keuntungan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif untuk mendorong peningkatan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, analisis rantai nilai menjadi alat yang krusial untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam sistem pemasaran, sehingga memungkinkan perumusan strategi yang tepat—baik melalui pemangkasan jalur distribusi maupun dengan menawarkan solusi yang disesuaikan bagi masing-masing pelaku dalam rantai tersebut. Mamangkay et al., (2023) menekankan bahwa dalam praktik pertanian, penting untuk memperhatikan keseluruhan tahapan sistem produksi, mulai dari penanaman, perawatan, hingga proses panen. Setelah fase produksi selesai, kegiatan dalam rantai nilai pemasaran memegang peran penting dalam mengevaluasi efektivitas jalur distribusi yang terbentuk, sehingga dapat dianalisis besarnya margin harga yang diterima oleh setiap pelaku yang terlibat dalam rantai tersebut.

Menurut (Lihawa et al., 2021), idealnya setiap pelaku dalam rantai nilai memperoleh keuntungan yang adil dan seimbang. Namun dalam praktiknya, petani sering kali tidak menerima imbal hasil yang setara akibat keterbatasan akses terhadap informasi—baik

mengenai harga, mekanisme pemasaran, maupun kualitas produk pertanian. Apabila seluruh tahapan dalam rantai nilai dirancang dan dikelola secara optimal, maka akan tercipta sistem yang lebih efisien serta menjamin keadilan bagi seluruh pihak, khususnya bagi petani sebagai produsen utama. Fenomena ini sesuai dengan temuan dari (Fatmawati & Sirajuddin, 2019) yang menyatakan bahwa struktur distribusi hasil pertanian di tingkat petani kecil di Indonesia masih didominasi oleh sistem yang tidak adil dan kurang menguntungkan bagi petani. Dalam kondisi seperti ini, intervensi teknis seperti pelatihan atau penyuluhan tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan penguatan kelembagaan sosial yang mampu menjembatani kepentingan petani dan akses pasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu pendekatan pengabdian yang mampu membangun sistem distribusi berbasis kelembagaan sosial lokal sebagai strategi transformasi ekonomi petani secara berkelanjutan.

Pendekatan kelembagaan sosial ini sangat relevan dengan konteks pertanian perdesaan. Kelembagaan sosial bukan hanya mencakup organisasi formal seperti kelompok tani atau koperasi, tetapi juga jaringan sosial informal yang ada di masyarakat, seperti hubungan antar petani, tokoh lokal, dan sistem gotong royong. Kelembagaan ini menjadi aset sosial yang dapat dimobilisasi untuk membangun sistem distribusi yang lebih efisien, transparan, dan berpihak kepada petani. Keberhasilan pengembangan sistem distribusi berbasis komunitas sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan lokal dan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan (Diatmika & Rahayu, 2022). Rantai nilai merupakan suatu pendekatan strategis dalam mengevaluasi proses bisnis yang melihat perusahaan sebagai jaringan aktivitas yang saling berkaitan, mulai dari input hingga output yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dalam konteks saat ini yang sarat dengan ketidakpastian dan persaingan pasar yang sangat dinamis, konsep rantai nilai menjadi semakin relevan untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan efisiensi dan penciptaan nilai. Menurut (Pearce, 2008), nilai yang dirasakan oleh pelanggan terbentuk melalui tiga sumber utama: diferensiasi produk, efisiensi biaya, dan kemampuan untuk merespons kebutuhan pelanggan secara cepat.

Konsep ini dikuatkan oleh (Porter, 2008a) yang menempatkan analisis rantai nilai sebagai alat strategis penting untuk membedah keunggulan kompetitif. Melalui pemahaman mendalam atas setiap aktivitas dalam rantai tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memungkinkan peningkatan nilai tambah atau pengurangan biaya, sehingga mampu memperkuat daya saingnya. Dalam konteks transformasi digital saat ini, penguasaan rantai nilai bukan lagi sekadar efisiensi logistik, melainkan bagaimana perusahaan memanfaatkan data, teknologi digital, dan kolaborasi lintas aktor untuk menciptakan nilai baru yang relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Selaras dengan pemikiran tersebut, konsep rantai nilai kini dipahami secara lebih luas sebagai keseluruhan rangkaian aktivitas dari hulu hingga hilir, yang mencakup proses produksi hingga penyaluran produk kepada konsumen akhir (Donovan et al., 2015). Kaplinsky dan Morris (2000) juga menjelaskan bahwa rantai nilai mencakup seluruh tahapan yang diperlukan untuk mengubah suatu gagasan menjadi produk yang digunakan oleh konsumen, hingga pada akhirnya dibuang setelah masa pakainya berakhir (Van Welie et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan rantai nilai tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan dan prinsip ekonomi sirkular, yang menjadi semakin relevan dalam konteks krisis iklim dan tuntutan produksi yang ramah lingkungan saat ini.

Porter (2008) mengklasifikasikan aktivitas dalam rantai nilai ke dalam dua kelompok utama, yaitu aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Aktivitas primer meliputi logistik masuk, proses produksi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, serta layanan purna jual. Sementara itu, aktivitas pendukung mencakup pengadaan, pengembangan teknologi, pengelolaan sumber daya manusia, dan infrastruktur organisasi. Di era digital saat ini, seluruh aktivitas tersebut semakin terhubung melalui pemanfaatan platform digital, big data, dan sistem otomatisasi, sehingga memungkinkan peningkatan efisiensi di berbagai tingkatan, baik mikro maupun makro. Lebih lanjut, Kaplinsky dan Morris (2001) menawarkan tujuh tahapan dalam menganalisis rantai nilai: dimulai dari identifikasi pelaku, pemetaan rantai, hingga perbaikan berkelanjutan (value chain upgrading). Salah satu temuan penting adalah bahwa sistem produksi global saat ini telah bergeser dari model tradisional "supplier push" menuju

pendekatan “market pulled”, dimana keberhasilan produk tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, melainkan oleh kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen secara real-time (Shinta et al., 2023). Ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya menyesuaikan kapasitas produksi, tetapi juga memperkuat sistem informasi pasar, respon permintaan, dan kualitas layanan. Tahap akhir dalam model Kaplinsky dan Morris adalah upgrading, yaitu peningkatan dalam aspek proses, produk, posisi pasar, atau keterlibatan dalam rantai nilai yang lebih tinggi. Tahap ini menjadi sangat relevan dalam konteks pascapandemi dan krisis pangan global, di mana penguatan sistem produksi dan distribusi menjadi prioritas strategis (Hernández-Rodríguez et al., 2025). Contohnya, adopsi teknologi digital oleh koperasi petani untuk mengelola distribusi hasil panen merupakan bentuk upgrading yang efektif, karena mampu meningkatkan efisiensi, mendorong transparansi harga, serta memangkas jalur distribusi dari produsen langsung ke konsumen akhir.

Secara teoritis, kelembagaan sosial mencakup seperangkat norma, nilai, dan jaringan yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat (Uphoff & Wijayarathna, 2000). Dalam konteks distribusi pertanian, kelembagaan ini berperan penting sebagai pengatur dan pelaku distribusi hasil tani secara kolektif. Misalnya, keberadaan koperasi tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menggantikan peran tengkulak dalam rantai distribusi, sekaligus meningkatkan efisiensi serta keadilan harga bagi petani. Hal ini diperkuat oleh temuan (Nadhar et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kelembagaan koperasi petani berbasis jagung di Provinsi Gorontalo mampu memangkas biaya distribusi dan meningkatkan harga jual jagung yang diterima petani secara signifikan. Lebih lanjut, sistem distribusi berbasis kelembagaan sosial tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan kepercayaan di tingkat komunitas. Kelembagaan ini bekerja berdasarkan prinsip kolektif, saling percaya, dan solidaritas sosial—faktor yang sulit ditemukan dalam mekanisme pasar murni. Dalam studi oleh (Milal, 2025) ditemukan bahwa norma sosial dan rasa percaya antarpetani di wilayah perdesaan menjadi fondasi yang memperkuat efektivitas kelembagaan dalam memasarkan produk pertanian. Selain itu, pendekatan kelembagaan ini sejalan dengan gagasan *community-based supply chain*, di mana distribusi dikelola oleh dan untuk komunitas itu sendiri (Liu et al., 2020). (Setyawanto et al., 2025) dalam penelitiannya di Jawa Timur menyoroti bagaimana Gapoktan dapat menjalin hubungan langsung dengan konsumen industri, sehingga memotong jalur distribusi yang sebelumnya melewati banyak perantara. Hal ini menciptakan nilai tambah dan mendorong keberlanjutan ekonomi petani.

Di beberapa daerah, kelembagaan lokal bahkan berkembang dalam bentuk kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes. Ermawati et al., (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah menandakan bahwa distribusi padi yang dikelola melalui BUMDes tidak hanya membantu menstabilkan harga di tingkat petani, tetapi juga meningkatkan pendapatan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara kelembagaan sosial dan kelembagaan formal mampu menciptakan sistem distribusi yang lebih kuat dan tangguh. Tidak hanya di sektor padi dan jagung, pendekatan ini juga relevan dalam komoditas hortikultura. Di Bali, (Martiningsih et al., 2024) menemukan bahwa sistem distribusi yang berbasis adat dan kelembagaan lokal mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kelestarian nilai budaya dan struktur sosial komunitas petani hortikultura. Kelembagaan lokal yang didukung oleh nilai tradisional terbukti efektif dalam mengelola distribusi dan menjaga keberlanjutan sumber daya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi produk pertanian berbasis kelembagaan sosial memberikan solusi yang tidak hanya teknis, tetapi juga sosial dan struktural terhadap ketimpangan dalam rantai distribusi konvensional. Melalui penguatan kelembagaan sosial, petani dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas, posisi tawar yang lebih tinggi, serta kestabilan harga yang lebih baik. Di sisi lain, sistem ini juga membangun ketahanan sosial dan ekonomi berbasis komunitas yang relevan dengan pembangunan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kelembagaan petani sendiri dapat dipahami sebagai struktur sosial yang berkembang secara organik oleh dan untuk pelaku utama sektor pertanian, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2006. Pelaku utama ini meliputi petani, pekebun, nelayan,

peternak, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, serta masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Mereka bukan hanya aktor ekonomi, melainkan juga bagian dari sistem sosial yang membentuk pola produksi dan konsumsi pangan nasional (Indonesia, 2006).

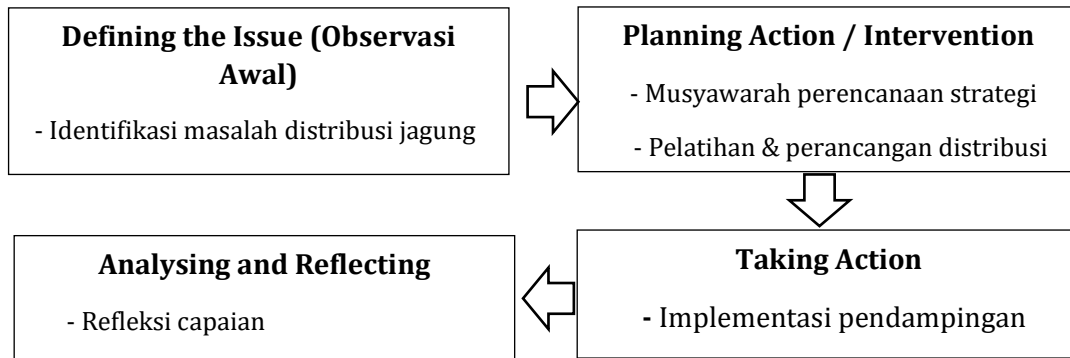
Dalam rangka mendukung keberlanjutan pertanian, (Soekartawi, 2007) menguraikan lima subsistem utama dalam kelembagaan petani. Pertama, subsistem sarana produksi, yang mencakup perencanaan dan pengadaan input pertanian seperti benih, pupuk, dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik lokal. Kedua, subsistem usahatani, yang menyangkut pembinaan teknis dan manajerial agar produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan. Ketiga, subsistem pengolahan, yang memungkinkan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil secara sederhana maupun lanjutan, sangat penting terutama untuk komoditas dengan sifat mudah rusak. Keempat, subsistem pemasaran, yang melibatkan aspek distribusi hasil panen ke pasar lokal maupun ekspor. Kelima, subsistem pelayanan pendukung, seperti jasa keuangan, logistik, dan asuransi, yang menjadi semakin vital dalam menghadapi risiko pertanian yang kian kompleks akibat perubahan iklim dan volatilitas harga pasar. Di era digital saat ini, fungsi kelembagaan petani mengalami transformasi yang signifikan. Sesuai dengan Permentan No. 273/Kpts/OT.160/4/2007, lembaga petani tidak hanya berperan sebagai wadah pembelajaran (*learning class*) dan unit produksi, tetapi juga sebagai penyedia informasi kritical dan layanan fisik atau jasa pada setiap tahapan subsistem agribisnis. Dengan kemajuan teknologi informasi, kelembagaan petani dituntut mampu mengakses data pasar, prediksi iklim, serta teknologi pertanian presisi, agar mereka tidak tertinggal dalam kompetisi global yang semakin menuntut efisiensi dan kualitas.

Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk merespons permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi oleh Kelompok Tani Kecamatan Turen Malang. Dalam konteks ketahanan pangan yang semakin krusial, diperlukan upaya konkret yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi petani, sehingga dapat dirumuskan pendekatan yang tepat sesuai dengan kondisi lokal. Kedua, menerapkan revitalisasi sistem distribusi berbasis kelembagaan sosial sebagai model pemberdayaan sosial ekonomi yang mampu memperkuat daya saing dan nilai tambah produk pertanian lokal. Tujuan tersebut diharapkan dapat mendorong terjadinya perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan di tingkat komunitas.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dipilih dalam kegiatan pengabdian ini karena karakteristiknya yang partisipatif dan berorientasi pada perubahan sosial berbasis kebutuhan komunitas. PAR tidak sekadar menjadi metode penelitian atau pengembangan program, tetapi menjadi kerangka kerja kolaboratif antara peneliti dan masyarakat (petani) dalam merumuskan masalah, merancang tindakan, melaksanakan intervensi, dan merefleksikan hasil secara bersama. Pendekatan ini sangat relevan untuk konteks pendampingan petani jagung di Turen, yang menghadapi tantangan dalam sistem distribusi produk mereka akibat lemahnya posisi tawar serta minimnya dukungan kelembagaan sosial yang kuat. Oleh karena itu, revitalisasi kelembagaan lokal sebagai instrumen distribusi menjadi strategi utama dalam program pengabdian ini. Untuk memastikan keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat dalam mendampingi petani jagung di Kecamatan Turen, diperlukan perencanaan kegiatan yang terstruktur, terukur, dan realistis. Pelaksanaan program pengabdian ini diawali dengan kegiatan observasi dan identifikasi masalah distribusi jagung yang dilakukan pada minggu pertama. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data terkait kondisi aktual distribusi dan peran kelembagaan lokal dalam proses distribusi tersebut. Tim pengabdian bekerja sama dengan perangkat desa untuk menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara, serta mendokumentasikan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Hasil dari kegiatan ini menjadi dasar dalam perumusan intervensi yang relevan dan tepat sasaran. Kelembagaan sosial mengalami pergeseran fungsi ke arah yang lebih produktif, ditandai dengan aktifnya Gapoktan dalam mengatur jadwal panen dan distribusi, serta mulai terbentuknya kepercayaan

antarpetani dalam berbagi informasi harga pasar. Proses refleksi ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan model distribusi yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada penguatan kelembagaan lokal. Bagian metode pelaksanaan berisi paparan tentang tahapan-tahapan atau langkah-



Gambar 1. Flowchart pendekatan *Participatory Action Research* (PAR)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap awal, yaitu *Defining the Issue*, dilakukan observasi partisipatif dan pengumpulan data sekunder dari dokumen desa, kelompok tani, serta wawancara informal dengan petani jagung dan pengurus lembaga desa. Hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa rantai distribusi jagung masih dikuasai oleh pedagang pengumpul, dengan petani tidak memiliki akses terhadap pasar akhir maupun informasi harga.



Gambar 2. *efining issue bersama lembaga berdaya amerta*

Kelembagaan lokal seperti Gapoktan dan BUMDes belum berfungsi secara optimal dalam distribusi hasil tani. Masalah utama yang teridentifikasi adalah rendahnya partisipasi petani dalam pengelolaan distribusi, lemahnya struktur kelembagaan, serta minimnya strategi pemasaran kolektif. Analisis masalah ini kemudian digunakan untuk menentukan arah tujuan program, yaitu memperkuat kapasitas kelembagaan sosial dalam mengelola distribusi jagung petani secara kolektif, adil, dan efisien. Memasuki tahap *Planning Action/Intervention*, dilakukan pertemuan musyawarah desa bersama kelompok tani, perangkat desa, pengurus BUMDes, serta stakeholder terkait untuk menyusun strategi intervensi. Perencanaan ini berfokus pada tiga hal: pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan petani melalui pelatihan manajemen distribusi

berbasis koperasi dan ekonomi lokal; kedua, penyusunan skema distribusi produk jagung yang memperpendek rantai pasok dan memperkuat posisi tawar petani; dan ketiga, penyusunan peran kelembagaan dalam koordinasi distribusi, termasuk revitalisasi fungsi Gapoktan sebagai pengelola gudang dan penyalur hasil panen. Strategi ini dikembangkan dengan mempertimbangkan sumber daya lokal yang tersedia dan berbasis pada kekuatan sosial komunitas yang sudah ada.



Gambar 3. Bersama Dinas Pertanian menyusun rencana dan strategi intervensi

Pada tahap *Taking-Action*, tim pengabdian bersama masyarakat melakukan implementasi program melalui pendampingan teknis dan fasilitasi kelembagaan. Beberapa aktivitas utama yang dilakukan adalah pelatihan tata kelola distribusi dan pemasaran hasil tani, pendampingan pembentukan tim distribusi desa, dan simulasi penyaluran hasil panen secara kolektif melalui Gapoktan. Dalam proses ini, dilakukan pula penguatan literasi digital untuk mendukung akses informasi pasar dan pemanfaatan media sosial sebagai alat pemasaran langsung ke pembeli. Tahapan ini berlangsung secara kolaboratif dengan mengutamakan pengambilan keputusan bersama melalui forum kelompok tani. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap minggu melalui forum diskusi terbuka guna menilai efektivitas intervensi dan merevisi strategi jika diperlukan.



Gambar 4. Implementasi pendampingan teknis & fasilitasi kelembagaan bersama gapoktan

Tahap terakhir adalah *Analysing and Reflecting on Action and Intervention*, di mana dilakukan refleksi bersama terhadap capaian program. Refleksi ini dilakukan dalam bentuk forum dialog dan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan petani, pengurus

kelembagaan, dan tim pengabdian. Dari hasil refleksi, ditemukan adanya peningkatan antusiasme petani terhadap sistem distribusi kolektif, meskipun tantangan tetap muncul dalam aspek logistik dan manajemen.



Gambar 5. *FGD tentang analysing and reflecting on action and intervention*

Memasuki minggu kedua, dilakukan musyawarah perencanaan program bersama para pemangku kepentingan lokal, termasuk kelompok tani (Gapoktan), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan tokoh masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyepakati strategi intervensi serta merancang langkah-langkah aksi kolaboratif yang dapat dijalankan. Forum ini juga menjadi ruang untuk membangun komitmen bersama dan memperkuat kepemilikan program di tingkat komunitas. Selanjutnya, pada minggu ketiga hingga keempat, dilaksanakan pelatihan mengenai tata kelola distribusi dan manajemen kelembagaan. Pelatihan ini ditujukan bagi petani jagung, pengurus Gapoktan, dan perangkat BUMDes untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam mengelola sistem distribusi yang lebih efisien dan adil. Materi pelatihan meliputi perencanaan distribusi kolektif, pencatatan logistik, pembukuan usaha kelembagaan, serta strategi menjaga keberlanjutan distribusi berbasis komunitas. Fasilitator pelatihan berasal dari akademisi dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Setelah peserta mendapatkan bekal pengetahuan, pada minggu kelima dilakukan pembentukan tim distribusi desa dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) distribusi jagung. Kegiatan ini melibatkan tokoh-tokoh petani terpilih yang berkomitmen untuk mengelola distribusi produk secara kolektif di bawah koordinasi kelembagaan lokal. SOP yang disusun mencakup prosedur penjadwalan distribusi, pencatatan hasil panen, mekanisme pengangkutan, serta pengelolaan gudang dan armada pengangkutan.

Implementasi dari sistem distribusi baru ini diuji coba melalui simulasi distribusi kolektif yang dilaksanakan pada minggu keenam dan ketujuh. Dalam simulasi ini, Gapoktan dan BUMDes berperan aktif sebagai pelaksana distribusi, sedangkan tim pengabdian berfungsi sebagai fasilitator dan pemantau proses. Kegiatan simulasi ini menggunakan sarana pendukung seperti gudang penyimpanan, timbangan, kendaraan distribusi, dan sistem pencatatan manual maupun digital sederhana. Sebagai penutup, program dilengkapi dengan evaluasi dan refleksi bersama yang dilakukan pada minggu kedelapan. Seluruh pelaku yang terlibat dalam program, termasuk petani, perangkat desa, pengurus kelembagaan, dan tim pengabdian, duduk bersama dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) untuk meninjau capaian, hambatan, serta keberlanjutan program. Kegiatan ini juga bertujuan untuk merumuskan rencana tindak lanjut agar sistem distribusi yang telah dirintis dapat terus berjalan dan berkembang secara mandiri oleh masyarakat setempat. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, program pengabdian ini tidak hanya memfokuskan pada perbaikan teknis distribusi hasil pertanian, tetapi juga memperkuat

kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat sebagai fondasi keberlanjutan sistem distribusi berbasis komunitas.

Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan merupakan hal yang esensial guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan program. Stakeholder yang terlibat mencakup lembaga formal dan informal, baik dari sektor pemerintahan, kelembagaan lokal, akademisi, hingga pelaku distribusi

Tabel 1. *Matriks Analisis Stakeholder (MAS)*

No	Nama Lembaga	Karakteristik Lembaga	Sumber Daya/Keahlian yang Dimiliki	Kebutuhan Program Pengabdian	Langkah Memperoleh Kerjasama
1.	Gapoktan Turen	Organisasi petani skala desa, berbasis koperasi	Pengalaman dalam produksi dan pemasaran jagung	Peningkatan kapasitas distribusi kolektif	FGD dan pelatihan bersama, penandatangan nota kesepa-haman
2.	BUMDes Desa Turen	Badan usaha desa, dikelola secara semi-profesional oleh desa	Manajemen usaha desa, armada distribusi, gudang desa	Kolaborasi dalam sistem logistik dan distribusi	Koordinasi kelembagaan melalui desa dan musyawarah kerja sama operasional
3.	Dinas Pertanian Kab. Malang	Lembaga teknis pemerintah di bidang pertanian	Penyuluh pertanian, data produksi, program pendampingan	Dukungan teknis dan legalitas kelembagaan petani	Audiensi resmi dan permintaan surat dukungan sebagai mitra pendamping
4.	Perguruan Tinggi (Tim Pelaksana)	Institusi pendidikan dan penelitian	Keahlian akademik, riset sosial, fasilitasi komunitas	Pengabdian berbasis riset dan metode partisipatif	Penyusunan MoU dan pelibatan langsung dosen serta mahasiswa
5.	Distributor/Pedagang lokal	Pelaku distribusi hasil panen di wilayah sekitar	Akses pasar, jaringan dagang jagung	Sinkronisasi harga dan pola distribusi	Dialog pasar dan pendekatan partisipatif dalam forum bersama petani
6.	Pemerintah Desa Turen	Lembaga pemerintahan desa	Dukungan regulasi desa, akses masyarakat, otoritas lokal	Dukungan legalitas, fasilitas, dan pengorganisasian masyarakat	Musyawarah desa dan SK dukungan kepala desa
7	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Loka Berdaya Amerta	Organisasi nirlaba berbasis pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi kelompok tani, pendampingan komunitas	Sinergi program dan pengalaman pemberdayaan lapangan	Jaringan kolaborasi antar lembaga, pelibatan dalam diskusi dan pelatihan

Dalam rangka menjawab tantangan distribusi hasil pertanian yang tidak berpihak kepada petani kecil, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di wilayah Turen dengan fokus utama pada revitalisasi sistem distribusi berbasis kelembagaan sosial. Proses pengabdian diawali dengan pemetaan masalah melalui observasi langsung ke lapangan dan wawancara mendalam dengan para petani. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa mayoritas petani mengalami ketergantungan pada tengkulak, distribusi hasil panen yang tidak efisien, serta lemahnya kelembagaan yang mendukung peran petani dalam proses distribusi.

Berdasarkan temuan tersebut, pendekatan yang dipilih adalah metode partisipatif melalui pembentukan forum kelompok tani dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala. Melalui forum ini, petani terlibat aktif dalam merumuskan solusi. Salah satu bentuk

tindakan teknis yang dilakukan adalah pembentukan kelembagaan koperasi tani sebagai wadah distribusi hasil panen secara kolektif. Selain itu, dilakukan pelatihan manajemen distribusi, transparansi harga, dan pencatatan produksi yang dapat diakses oleh semua anggota kelompok tani. Selama berlangsungnya kegiatan, dinamika yang terjadi sangat mencerminkan terjadinya transformasi sosial. Hal ini ditandai dengan munculnya institusi baru berupa koperasi petani yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat petani. Di sisi lain, terjadi perubahan perilaku yang signifikan, seperti meningkatnya kebiasaan kerja sama, terbukanya akses informasi harga pasar, dan peningkatan partisipasi petani dalam pengambilan keputusan kolektif. Kesadaran baru ini memperkuat posisi petani dalam rantai distribusi, yang sebelumnya hanya sebagai penerima hasil akhir pasar.

Indikator perubahan sosial juga tampak dari peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, munculnya kepercayaan terhadap struktur organisasi koperasi, serta keberlanjutan kegiatan diskusi dan evaluasi secara berkala yang kini menjadi kebiasaan baru dalam komunitas. Keseluruhan proses ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan teknis distribusi, namun juga mendorong transformasi budaya kerja petani yang lebih kolaboratif dan berbasis kemandirian.

Tabel 2. Hasil pendampingan

Aspek	Sebelum Program	Setelah Program
Sistem distribusi	Bergantung pada tengkulak, tidak efisien	Dikelola melalui koperasi tani, lebih transparan
Kelembagaan petani	Tidak terorganisir	Terbentuk koperasi tani Turen
Perilaku petani	Individualistis, pasif dalam pengambilan keputusan	Kolaboratif, aktif dalam forum kelompok tani
Akses informasi	Terbatas dan tidak merata	Terbuka, berbasis data dan diskusi
Kesadaran sosial	Rendah terhadap pentingnya distribusi kolektif	Tinggi, dengan inisiatif mandiri membangun sistem baru

Dengan hasil tersebut, kegiatan pengabdian ini menunjukkan dampak nyata dalam memperkuat kapasitas komunitas petani dan mengarah pada transformasi sosial yang berkelanjutan melalui pendekatan kelembagaan yang partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Turen menunjukkan bahwa transformasi sistem distribusi hasil pertanian dapat dicapai melalui pendekatan kelembagaan sosial yang berbasis partisipasi komunitas. Dalam diskusi pascapelaksanaan program, ditemukan bahwa pembentukan kelembagaan koperasi tani tidak hanya memberikan solusi teknis terhadap masalah distribusi, tetapi juga mengarah pada perubahan sosial yang mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan lebih mungkin berhasil ketika komunitas lokal memiliki kelembagaan yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif.

Sebelum adanya pendampingan, pola distribusi hasil panen jagung sangat tergantung pada tengkulak dan pihak perantara yang mendominasi pasar lokal. Situasi ini memperlemah posisi tawar petani dan mengurangi nilai ekonomi yang mereka terima dari hasil kerja mereka sendiri. Ketergantungan ini dapat dijelaskan melalui teori ketergantungan struktural yang menyatakan bahwa ketimpangan dalam akses distribusi seringkali dipertahankan oleh struktur ekonomi yang tidak adil. Dengan memperkenalkan kelembagaan koperasi, program ini menantang struktur tersebut dan menawarkan sistem distribusi baru yang lebih demokratis dan berpihak pada produsen utama: para petani. Melalui diskusi kelompok terfokus dan pertemuan-pertemuan reguler, petani mulai menyadari bahwa kolaborasi dan kerja kolektif adalah kunci untuk mencapai distribusi yang lebih menguntungkan. Kesadaran ini mencerminkan proses transformasi sosial, di mana terjadi pergeseran dari orientasi individualistik menuju semangat kolektif. Struktur sosial tidak bersifat statis, melainkan dihasilkan dan direproduksi melalui praktik sosial. Dalam konteks ini, perubahan dalam praktik distribusi menjadi cerminan dari transformasi struktur sosial lokal yang didorong oleh intervensi berbasis pemberdayaan.

Pemberdayaan petani dalam pengambilan keputusan distribusi juga memperlihatkan peningkatan kapasitas aktor lokal untuk mengelola sistem secara mandiri. Proses ini memperkuat teori pembangunan partisipatif, yang menekankan pentingnya kontrol masyarakat atas proses pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam praktiknya, petani mulai terlibat dalam pengelolaan koperasi, membuat perencanaan distribusi berdasarkan data produksi yang dikumpulkan secara mandiri, serta menyusun strategi pemasaran bersama. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi kelembagaan tidak hanya memberikan struktur, tetapi juga menciptakan ruang belajar sosial dan inovasi kolektif. Aspek penting lain yang muncul dari diskusi adalah peningkatan kesadaran kritis masyarakat tani terhadap pentingnya keadilan dalam akses pasar. Petani mulai memahami bahwa produksi pertanian yang tinggi tidak akan berdampak pada kesejahteraan jika tidak dibarengi dengan kontrol terhadap sistem distribusi. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Sen (2014) dalam *Development as Freedom*, di mana pembangunan dinilai dari sejauh mana individu atau kelompok mampu memperluas pilihan hidupnya dan mengontrol kondisi-kondisi yang memengaruhi kehidupan mereka.

Revitalisasi sistem distribusi melalui pendekatan kelembagaan sosial juga mencerminkan dinamika relasi kekuasaan di tingkat lokal. Intervensi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis, karena merestrukturisasi hubungan antara petani dan pihak-pihak dominan dalam rantai distribusi. Dalam pengertian ini, hasil pengabdian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang terjadi tidak hanya bersifat fungsional (mengatasi masalah distribusi), tetapi juga transformatif, karena menyentuh aspek struktur sosial, kesadaran, dan kapasitas kolektif. Diskusi juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengabdian ini sangat ditentukan oleh kesesuaian pendekatan dengan konteks lokal. Penggunaan metode partisipatif yang memberi ruang bagi petani untuk menyampaikan aspirasi dan turut merancang sistem distribusi baru terbukti efektif dalam menciptakan rasa memiliki (*ownership*) terhadap kelembagaan yang dibentuk. Model ini sesuai dengan teori pembangunan berbasis aset (*Asset-Based Community Development/ABCD*) yang menekankan pada penguatan potensi lokal sebagai titik awal pembangunan (McKnight & Kretzmann, 1993).

Hasil pengabdian ini menegaskan bahwa intervensi pembangunan yang efektif tidak cukup hanya dengan menyediakan solusi teknis, tetapi harus menciptakan ruang sosial yang mendorong transformasi, pemberdayaan, dan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Revitalisasi sistem distribusi berbasis kelembagaan sosial di Turen menjadi bukti nyata bahwa pembangunan yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal mampu mendorong perubahan sosial yang bermakna dan berkelanjutan. Pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendampingan petani jagung di Turen ini menunjukkan bahwa revitalisasi sistem distribusi melalui pendekatan kelembagaan sosial bukan hanya memungkinkan efisiensi dalam tata niaga hasil pertanian, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang mendalam. Secara teoretis, hasil ini memperkuat pandangan bahwa kelembagaan lokal merupakan fondasi penting dalam pemberdayaan ekonomi komunitas, yang dapat memberikan solusi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya bersama. Kehadiran kelembagaan koperasi yang dibangun bersama petani tidak hanya menciptakan akses distribusi yang lebih adil dan transparan, tetapi juga menumbuhkan kapasitas sosial masyarakat untuk mengelola perubahan secara mandiri. Proses ini menunjukkan bahwa pembangunan sosial-ekonomi yang berakar pada potensi lokal dan dikembangkan melalui pendekatan partisipatif cenderung lebih berhasil dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Selain berdampak pada dimensi ekonomi, intervensi ini juga memicu peningkatan kesadaran kritis petani terhadap pentingnya solidaritas dan kerja kolektif dalam menghadapi dominasi pasar. Pendekatan kelembagaan yang dikembangkan dalam program ini berhasil menantang struktur ketergantungan tradisional terhadap tengkulak, dan pada akhirnya memperkuat posisi tawar petani sebagai pelaku ekonomi utama. Namun, keberhasilan program ini juga membuka ruang evaluasi. Dalam pelaksanaannya, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan kelembagaan yang telah dibentuk, baik melalui pelatihan

kepemimpinan komunitas, pendampingan manajerial koperasi, maupun penguatan jejaring dengan pasar dan lembaga pendukung lainnya. Di samping itu, resistensi dari pihak-pihak yang sebelumnya diuntungkan oleh sistem distribusi lama menjadi tantangan tersendiri yang harus dikelola secara bijak dan strategis.

Berdasarkan hasil dan refleksi tersebut, direkomendasikan untuk melakukan tindak lanjut diantaranya model kelembagaan sosial seperti koperasi lokal dijadikan rujukan dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian di wilayah lain, dengan penyesuaian pada konteks lokal masing-masing. Pemerintah daerah dan lembaga pendukung pembangunan perlu memperkuat kolaborasi dengan komunitas melalui kebijakan yang memberi ruang partisipasi dan akses terhadap sumber daya produksi dan distribusi. Pendidikan kewirausahaan dan literasi pasar bagi petani ditingkatkan agar koperasi tidak hanya menjadi alat distribusi, tetapi juga penggerak inovasi ekonomi lokal. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari revitalisasi kelembagaan terhadap kesejahteraan petani dan dinamika sosial desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, L., & Suhendi, D. (2024). RESILIENSI PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, 1(2), 63–71. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpa/article/view/5113>
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Kudus: Ahlimedia Book.
- Donovan, J., Franzel, S., Cunha, M., Gyau, A., & Mithöfer, D. (2015). Guides for value chain development: a comparative review. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 5(1), 2–23. <https://doi.org/10.1108/JADEE-07-2013-0025>
- Ermawati, T., Dalmiyatun, T., & Prayoga, K. (2021). Pengaruh modal sosial terhadap keberlanjutan gapoktan ngudi rukun di Kabupaten Wonogiri. *Jambura Agribusiness Journal*, 3(1), 1–14. DOI: <https://doi.org/10.37046/jaj.v3i1.10129>
- Fatmawati, F., & Sirajuddin, Z. (2019). Analisis margin dan efisiensi saluran pemasaran petani jagung (*Zea mays*) di Desa Suka Makmur Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *Gorontalo Agriculture Technology Journal*, 2(1), 19–29. DOI: <https://doi.org/10.32662/gatj.v2i1.488>
- Green, G. P., & Haines, A. (2015). *Asset building & community development*. California: Sage publications.
- Hernández-Rodríguez, E., Boschma, R., Morrison, A., & Ye, X. (2025). The role of complementary interregional linkages for functional upgrading and downgrading of global value chains in EU regions. *Industry and Innovation*, 1–35. <https://doi.org/10.1080/13662716.2025.2480624>
- Indonesia, U.-U. R. (2006). Nomor 16 Tahun 2006. *Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40187/uu-no-16-tahun-2006>
- Lihawa, A., Uloli, H., & Rasyid, A. (2021). Analisis rantai nilai (value chain) pada komoditas jagung. *Jambura Industrial Review (JIREV)*, 1(2), 94–103. DOI: <https://doi.org/10.37905/jirev.v1i2.11843>
- Liu, L., Ross, H., & Ariyawardana, A. (2020). Community development through supply chain responsibility: A case study of rice supply chains and connected rural communities in Central China. *Sustainability*, 12(3), 927. <https://doi.org/10.3390/su12030927>
- Mamangkay, B., Baderan, D. W. K., Hamidun, M. S., & Dunggio, I. (2023). Pola aktivitas pengolahan pertanian jagung yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Kabupaten

- Gorontalo. *Jambura Geo Education Journal*, 4(1), 12–24. DOI: <https://doi.org/10.34312/jgej.v4i1.17258>
- Martiningsih, N. G. A. G. E., Lestari, P. F. K., & Jat, A. P. (2024). Persepsi Petani Mengenai Program Ekowisata Subak Sembung Sebagai Subak Lestari Untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan. *AGRIMETA: Jurnal Pertanian Berbasis Keseimbangan Ekosistem*, 14(2), 89–100. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/agrimeta/article/view/10912>
- McKnight, J., & Kretzmann, J. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. Chicago: ACTA Publications.
- Milal, A. (2025). PERAN MODAL SOSIAL DALAM KEBERHASILAN PROGRAM PERTANIAN PESANTREN ENTREPRENEUR: STUDI KASUS KERJASAMA PESANTREN RIYADLUL JANNAH DENGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LAHAN. *Ekonometrika: Jurnal Ilmiah Ekonomi Terapan*, 5(1), 14–32. <https://journalpedia.com/1/index.php/jiet/article/view/4493>
- Nadhar, M., Hermawaty, R. K., Ernawati, E., & Elviana, E. (2024). Pengaruh biaya produksi dan harga jual terhadap pendapatan petani jagung. *Jppi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(4), 206–219. DOI : <https://doi.org/10.29210/020244388>
- Pearce, R. M. G. H. (2008). *Manajemen Strategis 1 (ed. 10) Koran*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Porter, M. E. (2008a). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. NYC: Simon & Schuster.
- Porter, M. E. (2008b). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. NYC: Simon & Schuster.
- Sen, A. (2014). Development as freedom (1999). *The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change*, 525.
- Setyawanto, A., Hariyadi, B., & Hariyadi, A. (2025). Optimalisasi Investasi Pemberdayaan Sosial Untuk Mendukung Sukses Berwirausaha Masyarakat Tani Desa Tawang Rejeni Turen Malang. *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 1–12.
- Shinta, D., Suharsono, J., & Vidiyastutik, E. D. (2023). Analisis Value Chain Dan Economic Value Added Jamur Tiram Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Mahkota Jamur Kraksaan Probolinggo. *JUMAD: Journal Management, Accounting, & Digital Business*, 1(1), 51–60. DOI: <https://doi.org/10.51747/jumad.v1i1.1316>
- Soekartawi, S. (2007). E-Agribisnis: Teori dan Aplikasinya. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI): Bidang Pertanian*. <https://journal.uui.ac.id/Snati/article/view/1760>
- Uphoff, N., & Wijayaratna, C. M. (2000). Demonstrated benefits from social capital: the productivity of farmer organizations in Gal Oya, Sri Lanka. *World Development*, 28(11), 1875–1890. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00063-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00063-2)
- Van Welie, M. J., Truffer, B., & Yap, X.-S. (2019). Towards sustainable urban basic services in low-income countries: A Technological Innovation System analysis of sanitation value chains in Nairobi. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 33, 196–214. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2019.06.002>